

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan oleh pemiliknya yakni untuk memberikan manfaat bagi pemiliknya serta pihak yang menanamkan modalnya dalam perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari perusahaan yakni memaksimalkan kesejahteraan pemilik serta pemegang saham. Salah satu cara yang dilakukan dengan cara memaksimalkan pembagian hasil dari laba yang dimiliki. Laba tersebut tidak terlepas dari proses produksi, penjualan hingga pengorbanan (beban) yang dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu aspek yang membiayai perusahaan yakni hutang.

Kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal, kebijakan ini memiliki dampak pada konflik dan biaya keagenan. Pada teori *agency* menyatakan bahwa kebijakan hutang. Merupakan konsep dimana dengan hutang maka perusahaan akan melakukan pembayaran periodik atas bunga dan pokok pinjaman. Kebijakan hutang akan memberikan dampak pada pendisiplinan bagi manajer untuk mengoptimalkan pendanaan yang ada, karena penggunaan hutang yang cukup besar akan menimbulkan kesulitan keuangan dan atau resiko kebangkrutan.

Salah satu ukuran kebijakan hutang adalah *Debt to Asset ratio* (DAR). Menurut Darsono (2005: 54) bahwa rasio dalam pengukuran *Financial*

leverage digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disupply oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Rasio total hutang dengan aktiva yang biasa disebut rasio hutang (*debt to asset ratio*), mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang adalah semua hutang yang dimiliki perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan danannya menjadi semakin baik.

Menurut (Murni dan Andriana dalam Indahningrum dan Ratih, 2009) untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemegang saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang. Karena dengan penggunaan hutang, hak pemegang saham terhadap perusahaan tidak akan berkurang dan dapat mencapai keinginan perusahaan. Disamping itu perilaku manajer dan komisaris perusahaan juga dapat dikendalikan, namun sebaliknya manajer juga tidak menyukai pendanaan tersebut dikarenakan hutang mengandung resiko yang tinggi. Manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain, perilaku seperti ini dikenal sebagai keterbatasan rasional (*bounded rationality*).

Hutang dalam hal ini merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh perusahaan, sehingga kebijakan hutang harus melibatkan pemilik perusahaan yang dominan. Dalam hal ini kepemilikan tersebut diukur

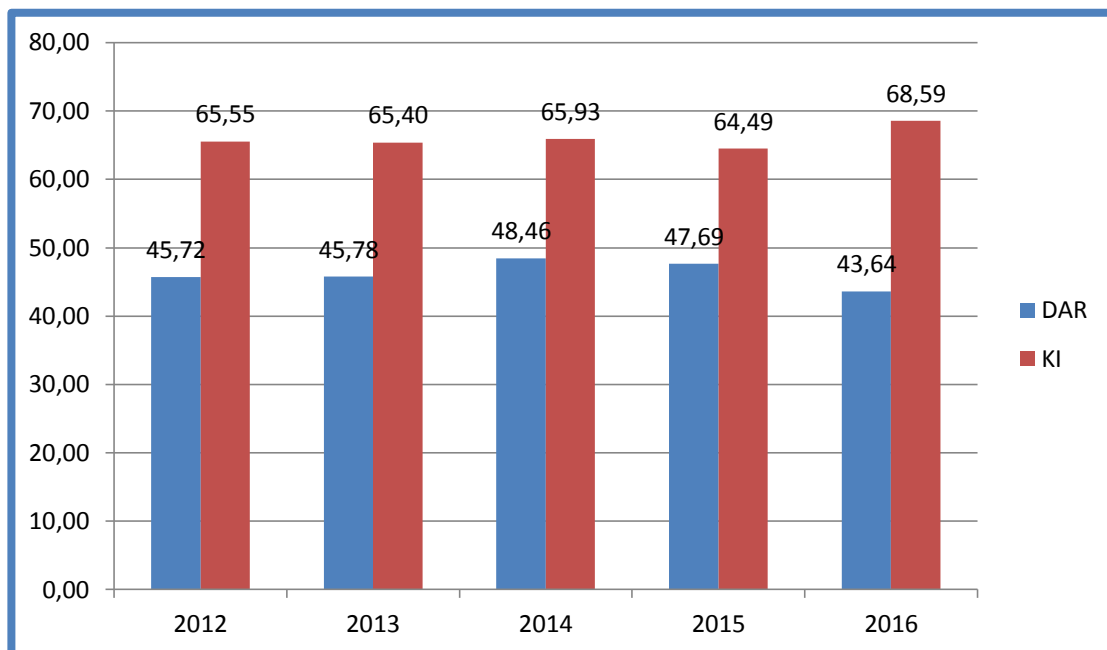
dengan struktur kepemilikan institusional. Rizae dalam Kusumaningtiyas (2012: 49) mendefinisikan kepemilikan institusional adalah perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun publik dan privat, investment trusts, mutual funds, dan kelompok-kelompok manajemen investasi. Berbeda dengan blockholder yang dalam kepemilikan hanya pada seorang ataupun sebuah keluarga, kepemilikan institusional lebih mengacu pada institusi yang dapat berupa asuransi, bank ataupun institusi lainnya. Kepemilikan institusional biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Jika investor institusional tidak puas dengan kinerja manajemen, maka mereka dapat menjual sahamnya.

Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer dalam hal penggunaan hutang. Tindakan monitoring tersebut akan mengurangi biaya keagenan karena kemungkinan perusahaan menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan kebangkrutan perusahaan (Crutchley, 1999). Semakin besar presentase saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional akan menyebabkan monitoring menjadi semakin efektif, melalui pengendalian perilaku *opportunistic* para manajer (Wahidahwati, 2001).

Tanpa adanya kepemilikan institusional yang mengawasi perilaku manajer, maka kecenderungan manajer bersikap *opportunistic* dengan

menggunakan hutang yang tinggi bukan untuk kepentingan pemilik tetapi untuk kepentingan pribadinya. Adanya kepemilikan institusional menyebabkan perilaku manajer lebih terkontrol dengan baik oleh pihak pemegang saham eksternal, pengawasan oleh pihak eksternal menyebabkan manajer menggunakan hutang dalam tingkat rendah untuk menghindari adanya resiko kebangkrutan (Nuriningsih, 2006).

Terkait dengan penjabaran di atas, maka dapat diajikan data kepemilikan institusional dan kebijakan hutang (DAR) dari perusahaan berikut ini:



Gambar 1.1: Data Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional perusahaan cukup fluktuatif. Sehingga adanya peregrakan penjualan atau

pelepasan saham. Kemudian hutang perusahaan juga cukup tinggi sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan. Hutang yang besar maka akan menurunkan minat dari investor. Hal tersebut sebagaimana juga ditemukan rasio hutang perusahaan yang nilainya cukup besar karena melebihi 50%. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kurang tertariknya investor karena banyak beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingkat hutang yang besar ini tentunya akan membuat investor menjadi enggan atau berstigma negatif terhadap perusahaan terutama dalam hal operasionalnya

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga peneliti mengambil judul yakni tentang Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya hutang perusahaan yang sangat besar sehingga akan menimbulkan stigma kurang baik dari investor
2. Pihak kepemilikan institusional cukup fluktuatif sehingga akan membuat pembagian dividen menjadi makin besar

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2012-2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini oleh peneliti yakni untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut mengenai teori agensi (keagenan) khususnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan permasalahan yang sebenarnya, sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang perusahaan sehingga tidak terjadi kasus-kasus manipulasi yang dapat merugikan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan.